

Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Sisingamangaraja Terhadap Perkembangan Sektor UMKM

Abdul Ghoni, Eep Muhammad Ramadhan
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
abdulghoni19@syekhnurjati.ac.id, eepramadhan4@gmail.com

Submitted: Revised: 2024/05/01 Accepted: 2024/05/11 Published: 2024/06/25

Abstract	MSME financing makes a major contribution to improving the performance of Islamic banks. The role of MSME financing is in accordance with the main role of Islamic banks as financial intermediary institutions, collecting funds from the public and channeling them in the form of financing. As in the case of the BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon, it has carried out its duties as a collector of public funds and a distributor of funds, which of course will be channeled back to the community. It can be in the form of KPR, Mitra Guna, Gold Installments or other financing such as KUR and Non-KUR. The purpose of this study is to analyze the role of Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja Cirebon in contributing to developing the MSME sector by helping to provide capital to customers who want to develop their business in the MSME sector, as well as what forms of education and motivation have been provided by the BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon for MSME customers to get support so they can develop their business to the fullest. The type of research conducted by the author is field research using qualitative methods, while the research data collection techniques are collected through interviews, observation, documentation, books, journal articles and then analyzed using descriptive methods. The results of the research analysis carried out are in accordance with the formulation of the problem, namely: (1) The role of BSI KCP Sisingamangaraja related to capital assistance has several stages, namely: The stage of collecting documents, validation, financing process, field surveys, committees, contracts, disbursement, maintenance and repayment. (2) The role of BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon related to education and motivation for MSMEs has not run optimally. BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon has so far not held an MSME development program to educate how important and potential it is to develop MSME. Then, BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon has so far not held training and digitization for MSME actors as a form of motivation provided by BSI.
Keywords	BSI, Financing, SMEs



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian yang sedang berkembang, masyarakat selalu membutuhkan modal

finansial untuk membuka usaha baru dan memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap perbankan relatif lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas diberbagai daerah mulai dari kota sampai desa¹.

Di Indonesia terdapat ada dua jenis bank yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan sistem bunga ².

Al-Quran sebagai pegangan hidup umat islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplit dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga Al-Quran sangat mendorong dan memotivasi umat islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka ³.

Perbankan syariah yang menjadi pelopor di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang memorakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara, Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia yang beroperasi tahun 1992, pun terimbas dampak krisis awal⁴.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor memiliki tantangan pengembangan yang sangat banyak, mulai dari pemasaran produk hingga masalah permodalan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah inklusi keuangan bagi UMKM agar masalah permodal bisa teratasi. Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang perannya sangat diharapkan oleh UMKM karena dana yang tersedia di bank syariah lebih banyak jika dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro seperti baitul malwat tamwil (BMT) dan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Meskipun masalah yang dihadapi oleh UMKM sangat banyak, akan tetapi UMKM

¹ Syarif Kasim. and F. M Irfan, "ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH. Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG.," in *ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH* (Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2016), 1–23.

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

³ Kasim. and Irfan, "ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH. Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG."

⁴ Umam, K. *Manajemen Perbankan Syariah, Bandung* (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013), <https://digilib.uinsgd.ac.id/64847/>.

memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar Sembilan puluh sembilan persen dari total keseluruhan di Indonesia ⁵.

Bukti perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat ialah menggunakan menyampaikan pembiayaan yg disalurkan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Fokus primer bank syariah merupakan penyaluran kapital ke sektor UMKM yg notabene membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Mengapa sektor UMKM perlu penyaluran modal? karena sektor UMKM nasional dikenal mempunyai karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yg besar, mengakomodasi peran warga miskin dan secara umum dikuasai dalam struktur ekonomi. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang motilitas UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan pada berbagi usahanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Bila hal tadi tidak teratasi maka kemungkinan perjuangan buat membangun lapangan pekerjaan akan sulit diupayakan⁶. Penelitian membahas tentang Peran Bank Syariah Indonesia terhadap perkembangan sektor UMKM di Sisingamangaraja Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Manajemen dan Organisasi Bisnis Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja terkait dengan bantuan permodalan pada UMKM dan bagaimana peranan Bank Syariah Indonesia KCP Sisingamangaraja terkait dengan edukasi dan motivasi terhadap UMKM.

METODE

Penelitian ini berlokasi di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Sisingamangaraja, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.28, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45112, Indonesia. Waktu yang direncanakan oleh peneliti untuk penelitian ini mulai bulan Januari sampai April 2023. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan Field Research (penelitian lapangan) dengan langsung mengunjungi dan mencari informasi dari situasi tempat penelitian. Pendekatan penelitian ini membuat peneliti mencari data dengan terjun ke lapangan untuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dan dideskripsikan menjadi data hasil temuan. Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder: Sumber

⁵ Zamroni, "Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh)," *Jurnal Iqtishadia* 6, no. 2 (2016): 225–140.

⁶ Ana Widya Puspitasari, *Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Indonesia, Psikologi Perkembangan* (Sidoarjo: UMSIDA, 2019).

data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara mendalam kepada Agung Maulana. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam beberapa kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sistematika menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon Terkait dengan Bantuan Permodalan Terhadap UMKM

Berikut tahapan-tahapan pemberian pembiayaan/modal oleh BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon:

1. Mengumpulkan Dokumen Pengajuan Pembiayaan

Pelaku UMKM harus mengumpulkan dokumen pengajuan pembiayaan berupa:

- a. Identitas diri (KTP, NPWP, KK, Surat nikah)
- b. SKU/SIUP/NIB
- c. RAB
- d. Daftar stok
- e. Catatan keuangan/nota-nota/rekening koran
- f. Dokumen lain mengikuti kondisi nasabah.

2. Validasi atau Pengecekan Dokumen

Pihak bank akan melakukan pengecekan data yang tertera pada dokumen pengajuan pembiayaan yang diajukan UMKM dengan menganalisa hal-hal berikut:

- a. Profil atau Gambaran Umum UMKM yang bermohon
 - Seberapa baik profitabilitas yang dimiliki dan bagaimana aliran kas yang dimiliki pemohon.

- Analisa yuridis untuk melihat ketaatan dan kekuatan hukum yang dimiliki pemohon dalam menjalankan usahanya.
- b. Setelah pengecekan bank selanjutnya akan menilai seberapa layak jaminan yang diusulkan sebagai salah satu bahan pertimbangan pemberian pembiayaan.
- c. Jika jaminan dianggap layak, maka bank akan membuat usulan kepada pimpinan terhadap permohonan tersebut guna dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan.

3. Proses Pembiayaan

Pada tahap proses pembiayaan BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon yang disampaikan oleh Mas Agung Maulana yaitu menggunakan aktivitas menganalisa data pinjaman serta keuangan dengan maksud dan tujuan agar bisa menentukan tingkat risiko atas pinjaman yang dilakukan nantinya. Kemudian memastikan bahwa orang yang mengajukan pembiayaan memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Ini bukan hanya tentang jumlah pinjaman utama, tetapi juga Margin yang disepakati dengan kreditur (bank). Analisis kredit tersebut disingkat 5C, yaitu antara lain:

a. *Character*

Analisis karakter kepribadian nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan kerja dan bisnisnya.

Ada beberapa parameter yang menjadi pertimbangan dalam analisis karakter ini, antara lain mencakup aspek kepribadian calon debitur yang bertanggung jawab, jujur, terbuka, serta tidak memberikan pola perilaku negatif seperti suka berbohong, dan lain sebagainya.

b. *Capacity*

Analisis skapabilitas calon debitur sangat penting dalam menentukan kemampuannya dalam melunasi tanggung jawabnya pada perusahaan. Penilaian ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, kemampuan memahami peraturan pemerintah, memimpin, menguasai arena bisnis, dan pandangan akan tujuan usaha kedepannya.

Dengan demikian, tagihan atau kredit nantinya akan diperhitungkan agar dapat memenuhi kebutuhan debitur atas kredit yang diterimanya.

c. *Capital*

Analisis kapital merupakan sejumlah dana atau saham yang dimiliki oleh seorang prospek.

Seiring dengan meningkatnya modal bank, semakin serius pula para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sehingga juga akan meningkatkan keamanan debitur ketika memberikan pembiayaan.

d. *Collateral*

Analisis Collateral/Agunan adalah produk atau barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah atas kredit yang diterimanya.

Jaminan harus dievaluasi oleh pemberi pinjaman untuk menentukan tingkat risiko kewajiban keuangan nasabah kepada kreditur.

Risiko tersebut dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *collateral* yang sesuai kepada nasabah.

e. *Condition*

Analisis kondisi ekonomi calon kreditur. Penilaian ini juga terkait dengan apabila sedang terjadi masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya yang dapat berdampak pada situasi ekonomi calon debitur.

4. Survey Lapangan

Pihak bank akan melakukan survey lapangan atau mendatangi ke tempat pelaku UMKM untuk melihat seberapa besar potensi yang dimiliki pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, namun yang paling penting adalah dilihat dari sisi kesanggupan nasabah dalam tanggung jawab pembiayaan yang telah diberikan.

5. Komite

Proses menganalisis permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh debitur untuk pemberian kelayakan pembiayaan. Analisis tersebut merupakan proses penting untuk terealisasinya pembiayaan pada Bank Syariah, analisis tersebut dilakukan oleh komite pembiayaan untuk menilai kelayakan calon nasabah,

mengurangi resiko tidak terbayarnya pembiayaan, menentukan kebutuhan yang paling layak. peran Komite pembiayaan sangat penting untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

6. Akad

Setelah semuanya disetujui oleh pihak Bank dan nasabah selaku pihak yang mengajukan pembiayaan, selanjutnya yaitu Akad (kesepakatan). Dan apabila nasabah ingin membatalkan pengajuan pembiayaan maka pihak bank pun akan membatalkan dan memaklumi nya serta menerima putusan dari nasabah yang ingin mereject pengajuan pembiayaan tersebut.

7. Pencairan

Ketika kedua belah pihak antara Bank dan pelaku UMKM menyetujui kesepakatan sebelumnya yang telah dibicarakan, selanjutnya pihak Bank mencairkan apa yang dibutuhkan nasabah. Namun yang dicairkan bukan uang tetapi barang yang menjadi kebutuhan pelaku UMKM tersebut. Karena Bank Syariah memakai akad murabahah, jadi yang dicairkan bukan berbentuk uang tetapi barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Kemudian nanti nasabah mencicil dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

8. Maintenance

Maintenance sebagai kombinasi dari semua kegiatan administrasi teknis yang diperlukan untuk menjaga peralatan, instalasi dan asset fisik dalam kondisi operasi yang diinginkan. Tujuan dari pemeliharaan yaitu untuk memastikan fungsi sistem (ketersediaan, efisiensi dan kualitas produk), memastikan sistem atau kehidupan pabrik. Untuk peralatan produksi Untuk peralatan produksi, memastikan fungsi sistem adalah tujuan utama dari fungsi pemeliharaan.

Maintenance atau pemeliharaan harus memberikan keandalan, ketersediaan, efisiensi, dan kemampuan yang tepat untuk menghasilkan dengan kualitas yang tepat untuk sistem produksi, sesuai dengan kebutuhan. Memastikan kehidupan sistem

mengacu untuk menjaga sistem dalam kondisi kerja yang tepat, mengurangi peluang kerusakan kondisi, dan dengan demikian meningkatkan kehidupan sistem.

9. Pelunasan

a. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas apabila:

- Lunas sesuai jangka waktu pembiayaan,
- Nasabah UMKM tersebut melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya.

b. Nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai dengan biaya angsuran yang dijatuhkan oleh pihak Bank. Setelah seluruh kewajiban Nasabah lunas maka pihak Bank akan melakukan penghentian permintaan angsuran.

Kemudian untuk data pembiayaan BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon yang di alokasikan untuk UMKM tidak boleh di berikan kepada orang lain dikarenakan rahasia pihak bank.

Peranan BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon Terkait dengan Edukasi Dan Motivasi Terhadap UMKM

1. Peranan Dalam Wujud Edukasi Terhadap UMKM

Perbankan selain sebagai salah satu agen pembangunan (agent of development) juga merupakan lembaga yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yaitu lembaga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi tersebut juga menjadi concern dari perbankan syariah disamping fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS). Pihak BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon menjelaskan;

“Sebenarnya untuk program pembinaan UMKM di BSI sendiri untuk saat ini belum ada, karena kita bukan lembaga untuk pengelolaan seperti halnya Bank Indonesia dan Dinas Koperasi. Kita kembali lagi ke fungsi bank sebenarnya menghimpun dana masyarakat yang nantinya akan disalurkan lagi ke unit usaha Bank tersebut, bisa

dalam bentuk KPR, Mitra Guna, Cicilan Emas, atau pembiayaan yang lainnya termasuk KUR dan Non KUR”.

Apa yang disampaikan tersebut sejalan dengan apa yang tercantum dalam misi pertama BSI yakni memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Dalam misi tersebut dijabarkan tujuan dari BSI adalah untuk melayani kurang lebih 20 juta nasabah secara maksimal. Untuk menjalankan misi tersebut, bank syariah akan lebih realistis apabila bank syariah tersebut mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal. Kegiatan bank syariah antara lain dengan menyediakan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta melakukan pengembangan fungsi sosial pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Pihak BSI KCP Sisingamangaraja menjelaskan;

“Dalam rangka pencapaian visi dan misi kita, kita harus bisa dengan gencar melakukan sosialisasi dan terobosan-terobosan baru terkait dengan fungsi bank syariah itu sendiri, apalagi kita baru saja sudah merger sehingga harus ada penginformasian kembali kepada masyarakat. Selain sosialisasi, BSI juga sekarang harus lebih multi-fungsi, harus jadi lembaga pengelola dana-dana syariah seperti zakat dan lain sebagainya”.

Apa yang dijelaskan tersebut relevan dengan urgensi bank syariah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia. Prinsip syariah misalnya prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan obyek yang haram (Heri & Sudarsono, 2018) Hal ini relevan dengan yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 276.⁷

أَتِيْمٌ كَفَّارٌ كُلٌّ يُحِبُّ لَا وَاللَّهِ ۖ الصَّدَقَاتِ وَيُرِي الرِّبَا اللَّهُ يَمْدُقْ

⁷ Heri and Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, n.d.).

Terjemahan: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa" (Q.S Al-Baqarah/2:276).

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini ditafsirkan "Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada harta yang disedekahkan serta membalasnya dengan balasan berlipat ganda. Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba. Begitu juga terhadap orang yang terus melakukannya⁸.

Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan pahalanya serta memberkahi harta itu. Karena menghalalkan riba. Ada pula yang menafsirkan "kafir" di sini dengan kufur nikmat karena tidak menunaikan kewajiban pada hartanya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

Sistem lembaga keuangan atau aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi astrument penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu saja menurut adanya sistem yang baku untuk mengatur kehidupannya. Termasuk didalamnya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Sementara, didalam perjalanan hidup umat islam, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekunder (Irfadilla, 2011).

Komitmen perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat adalah dengan memberikan pembiayaan yang disalurkan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor UMKM yang notabene membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Mengapa sektor UMKM perlu penyaluran modal? Karena sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur

⁸ W Manupraba et al., *TafsirQ* (Jakarta: JavanLabs, n.d.).

ekonomi. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka kemungkinan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan sulit diupayakan.

Urgensi tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak BSI KCP Sisingamangaraja;

“Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini perkembangan sektor UMKM sangatlah pesat. UMKM di Sisingamangaraja mempunyai potensi yang sangat besar untuk pemberdayaan sektor UMKM, karena kita tau Sisingamangaraja berada sekitar tempat objek wisata seperti pelabuhan, Gedung BAT yang biasa dijadikan sebagai destinasi untuk berfoto yang kebetulan juga disekitaran gedungnya ada taman, kemudian sebelah utara Bank BSI kami juga terdapat Rumah Sakit, Universitas NU dan juga sekolah kristen yang ke tiganya itu berdekatan juga banyak tempat lainnya. Maka dari itu, peluang untuk pemberdayaan UMKM juga sangat besar untuk jangka panjang. UMKM yang berkembang juga tidak jauh-jauh dari sektor-sektor pemenuhan kebutuhan wisatawan atau masyarakat sekitar dan itu harus kita dukung dengan baik tentunya. Salah satu alasan mengapa kemudian kita harus mensupport UMKM karena UMKM itu banyak fungsinya”.

Apa yang dijelaskan tersebut relevan dengan yang didefinisikan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa UMKM adalah perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peranan usaha mikro tersebut posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.

2. Peranan Dalam Wujud Motivasi Terhadap UMKM

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan UMKM

mewakili jumlah kelompok usaha terbesar, UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap 1884isbanding1884 nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu 1884isba mengurangi pengangguran.

“Untuk training atau pelatihan untuk para pelaku UMKM kita tidak ada, namun khusus pegawai ada. Setiap tahun kita ada Refreshment produk, Refreshment gaya marketing dan Refreshment cara proses. Tapi kalo digitalisasi ke pelaku UMKM sampai saat ini belum ada. Karena kita tahu sendiri UMKM itu kan ada 3 pihak yaitu penjual, pembeli dan penyalur dana. 1884isbanding pelaku UMKM digitalisasi dengan membuat QRIS dia bikin brekening sendiri. Jadi untuk pembayaran konsumen ke dia bisa lewat transfer via BSI, nah 1884isbandin fasilitasi itu. Tapi kalo pelaku UMKM nya masih tradisional mereka memilih uang cash 1884isbanding digitalisasi. Kita kembalikan lagi kepada pelaku UMKM tersebut mau dengan cara seperti apa, jadi kita hanya penyalur dana tidak mengharuskan pelaku UMKM harus ini harus itu”.

Jadi BSI KCP Sisingamangaraja belum menyediakan pelatihan atau training digitalisasi kepada para pelaku UMKM sebagai fasilitas untuk mengembangkan UMKM, dan dari pihak pelaku UMKM nya pun mengkonfirmasi bahwa BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon belum mengadakan program pembinaan dan pelatihan terkait UMKM. Pihak BSI menyampaikan bahwa pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan sendirinya tanpa campur tangan dari pihak BSI, maka pelaku UMKM harus kreatif dalam mengembangkan usahanya sendiri. Pihak BSI menyampaikan bahwa ada pelaku UMKM yg sudah menjalankan digitalisasi dengan membuat QRIS agar konsumen bisa melakukan transaksi melalui transfer via BSI. Tapi ada juga pelaku UMKM yang memilih menggunakan cara tradisional yaitu uang cash dibanding digitalisasi. Jadi untuk training dalam pengembangan UMKM pihak BSI

hanya menyediakan khusus untuk para pegawainya saja sampai saat ini belum ada untuk para pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan BSI KCP sisingamangaraja Cirebon terkait dengan bantuan permodalan terhadap UMKM ada beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama, tahap mengumpulkan dokumen pengajuan pembiayaan. Kedua, validasi dan pengecekan dokumen. Ketiga, proses pembiayaan. Proses pembiayaan tersebut BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon melakukan dengan cara analisis 5C, Yaitu (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Keempat, survey lapangan, dengan tujuan melihat seberapa besar potensi yang dimiliki pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kelima, komite. Pada tahap ini dilakukan keputusan pembiayaan oleh *Branch Manager* (BM). Keenam, akad. Dalam tahap ini BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon menggunakan akad *Murabahah*. Ketujuh, pencairan. Tetapi dalam tahap pencarian pihak BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon tidak mencairkan uang tetapi barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut karena kembali kepada akad yang dipakai yaitu akad *Murabahah*. Kedelapan, Maintenance atau pemeliharaan. Kesembilan, Pelunasan. Nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai dengan biaya angsuran yang dijatuhkan oleh pihak bank. Kemudian data pembiayaan yang dialokasikan BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon untuk UMKM tidak memberikan izin untuk dilampirkan dikarenakan suatu rahasia pihak Bank.
2. Peranan BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon terkait dengan edukasi dan motivasi terhadap UMKM belum berjalan dengan maksimal. BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon sejauh ini belum mengadakan program pembinaan UMKM untuk mengedukasi seberapa besar penting dan potensi untuk

mengembangkan UMKM. Kemudian, BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon sejauh ini juga belum mengadakan pelatihan dan digitalisasi ke pelaku UMKM sebagai bentuk motivasi yang disediakan oleh pihak BSI. Pihak BSI hanya penyalur dana saja untuk selebihnya pelaku UMKM sendiri yang mengembangkan usahanya. Dan dari salah satu pihak UMKM pun mengatakan bahwa BSI KCP Sisingamangaraja Cirebon belum mengadakan program pelatihan dan digitalisasi untuk para pelaku UMKM.

REFERENCES

- Heri, and Sudarsono. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, n.d.
- Kasim., Syarif, and F. M Irfan. "ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH. Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG." In *ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH*, 1–23. Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2016.
- Manupraba, W, I S Wijayanto, B H Winata, R Darsono, M Siregar, M F Muthohar, and I Suryoputro. *TafsirQ*. Jakarta: JavanLabs, n.d.
- Puspitasari, Ana Widya. *Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Indonesia. Psikologi Perkembangan*. Sidoarjo: UMSIDA, 2019.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Umam. K. *Manajemen Perbankan Syariah. Bandung*. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/64847/>.
- Zamroni. "Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)." *Jurnal Iqtishadia* 6, no. 2 (2016): 225–140.